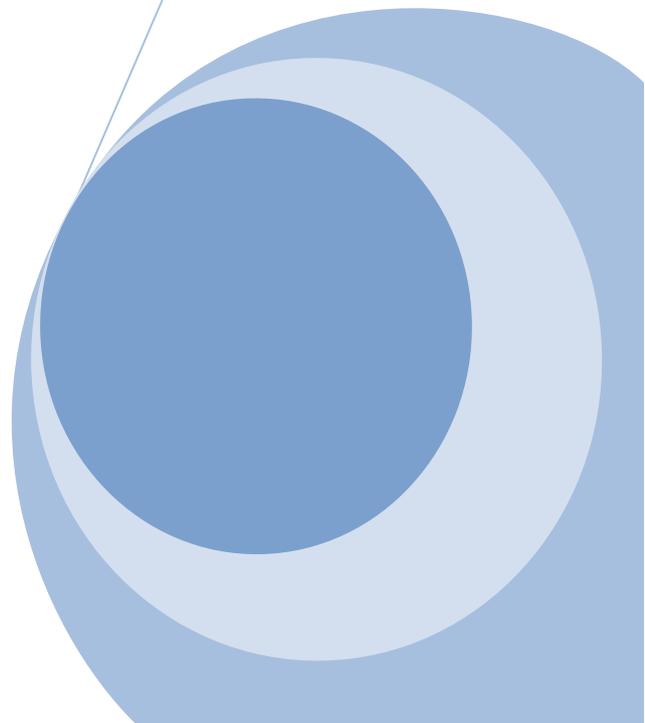


**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 34A TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2016 – 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PEKALONGAN**

Jalan Urip Sumoharjo No. 55 Pekalongan Telepon (0285) 4410393  
email : [dpmppa.pekalongankota@gmail.com](mailto:dpmppa.pekalongankota@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Selama periode RPJMD Tahun 2016-2021, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Renstra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Renstra penetapan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
2. Perubahan Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 41A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021; dan
3. Perubahan kedua Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

Penyusunan Perubahan Renstra dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah.

Di tahun 2019, Perangkat Daerah kembali menyusun perubahan ketiga Renstra. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Hasil revidi Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan ;
3. Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Pekalongan, 22 November 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan



**SRI WAHYUNI, SH**  
**NIP 19600116 198603 2 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>I</b> 1.1 ..... <b>LATAR</b>	<b>1</b>
<b>BELAKANG.....</b>	<b>3</b>
1.2 ..... <b>LANDASAN</b>	<b>9</b>
<b>HUKUM.....</b>	<b>10</b>
1.3 <b>MAKSUD DAN TUJUAN.....</b>	
1.4 <b>SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	
<b>BAB GAMBARAN PELAYANAN DPMPPA KOTA</b>	
<b>II</b> <b>PEKALONGAN.....</b>	<b>12</b>
2.1 <b>TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1 Tugas</b>	<b>12</b>
<b>dan Fungsi.....</b>	<b>12</b>
2.1.2 <b>Struktur Organisasi.....</b>	<b>25</b>
2.2 <b>SUMBER DAYA DPMPPA KOTA PEKALONGAN...</b>	<b>26</b>
2.2.1 <b>Sumber Daya Manusia.....</b>	<b>26</b>
2.2.2 <b>Sarana Dan Prasarana.....</b>	<b>26</b>
2.3 <b>KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....</b>	<b>27</b>
2.4 <b>TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN</b>	
<b>PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN.....</b>	<b>38</b>
2.4.1 <b>Tantangan.....</b>	<b>38</b>
2.4.2 <b>Peluang.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>41</b>
<b>III</b> 3.1. <b>IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS</b>	
<b>DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPPA KOTA</b>	
<b>PEKALONGAN.....</b>	<b>41</b>
3.2 <b>TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH</b>	
<b>DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	
<b>TERPILIH.....</b>	<b>43</b>
3.3 <b>TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA</b>	
<b>PROVINSI.....</b>	<b>51</b>
3.3.1 <b>Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA.....</b>	<b>51</b>

3.3.2	Telaahan Renstra Kementerian Desa/PMD.....	54
3.3.3	Telaahan Renstra PD Provinsi (Bagi Kab.Kota)....	56
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS...	59
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	59
3.4.2	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	59
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	59
BAB	TUJUAN DAN SASARAN.....	61
IV		
BAB	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPPA KOTA	
V	PEKALONGAN.....	67
BAB	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
VI	PENDANAAN.....	68
BAB	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	133
VII		
BAB	PENUTUP.....	135
VIII		

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
2.	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	26
3.	Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi.....	27
4.	Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan.....	28
5.	Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan.....	30
6.	Tabel 2.6	Perbandingan Capaian IPG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah.....	35
7.	Tabel 2.7	Perbandingan Capaian IDG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah.....	35
8.	Tabel 28	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	36
9.	Tabel 2.9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2017.....	38
10.	Tabel 2.10	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.....	38
11.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	41
12.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihasilkan.....	51
13.	Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	53
14.	Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	56

15.	Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (PP PA) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	57
16.	Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Pemberdayaan Masyarakat Desa) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	58
17.	Tabel 3.7	Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
18.	Tabel 3.8	Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
19.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.....	62
20.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	67
21.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif.....	70
22.	Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	134

## DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra.....	2
2.	Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
3.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan.....	25



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

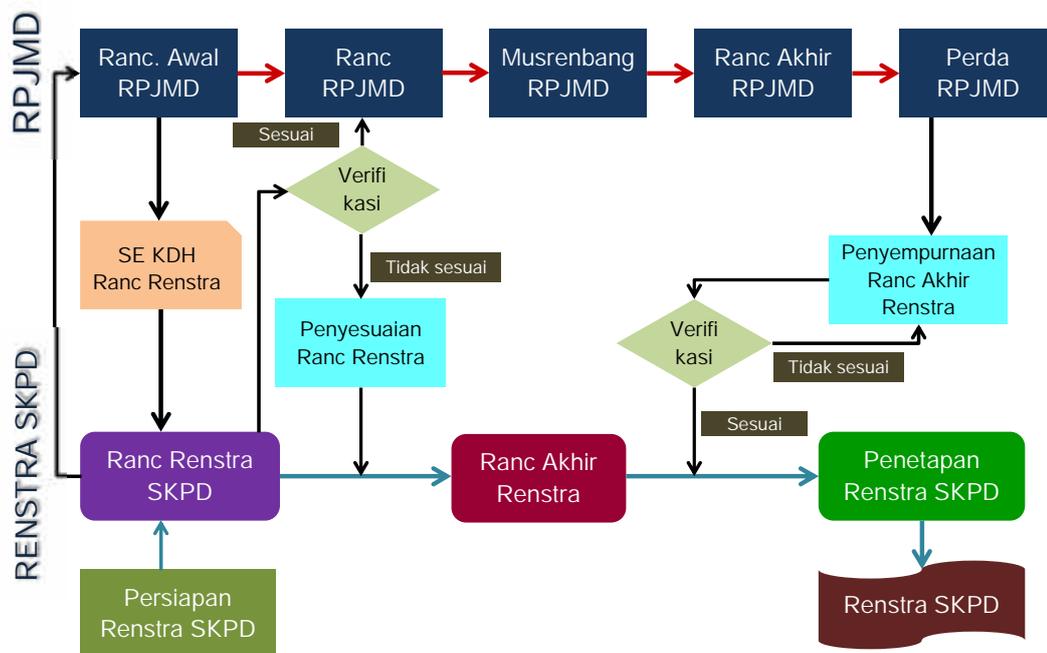
Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Pekalongan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai salah satu OPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan Perda dimaksud.

Dalam kerangka penjabaran/penyesuaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perubahan RPJMD 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyusun dan menetapkan Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.



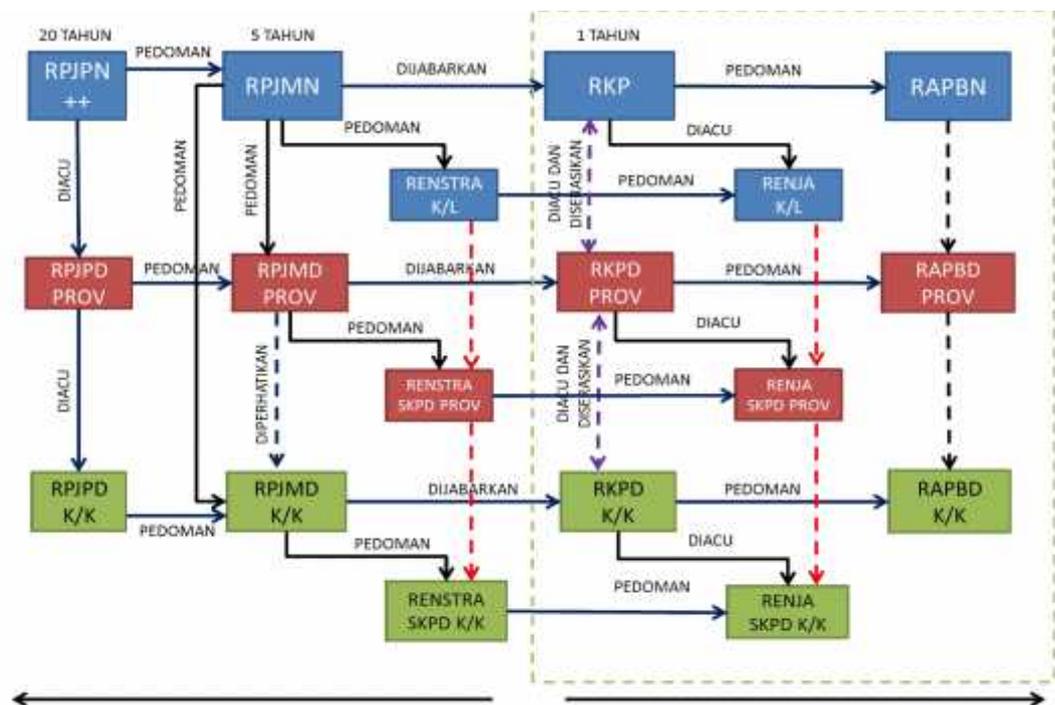
**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai salah satu dokumen perencanaan juga disinkronkan dengan perencanaan pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar juga merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normative lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 direvisi dalam satu kerangka yang integratif, holistik, bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global.

*Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat digambarkan dalam gambar 1.2 berikut :*



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Ketiga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

### 1.2.1 Landasan Idiil

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila

### 1.2.2 Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945

### 1.2.3 Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960)
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan

- Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990)
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54)
  15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
  16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
  18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

- dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)
  25. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162)
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698)
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19)
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30)
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
46. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kota Pekalongan
47. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Ketiga Renstra-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2016 -2021 ini disusun dengan maksud penyesuaian terhadap perubahan Susunan Perangkat Daerah dan diterbitkannya Permendagri 86 Tahun 2017 sehingga dokumen Perubahan Ketiga Renstra ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 guna memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

##### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

##### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**BAB VIII: PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan DPMPPA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pengkoordinasian tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan

pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 tahun 2018 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);

- j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

#### 1.1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. pelaksanaan fungsi akuntansi;
- g. penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
- h. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
- d. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

## 2. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat;
- c. perumusan sasaran bahan kebijakan fasilitasi, bimbingan dan kerjasama di bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pengkoordinasian kegiatan gotong royong masyarakat;
- g. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan fasilitasi kelembagaan masyarakat;
- h. penyelenggaraan pengembangan kegiatan pengelolaan dan penyusunan data kelurahan di bidang pembangunan, potensi, lembaga masyarakat, institusi dan peran serta masyarakat;
- i. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2.1 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan data Pemberdayaan Masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data Pemberdayaan Masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya data base Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan data profil kelurahan, potensi ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna ;
- g. pelaksanaan pengembangan kegiatan gotong royong masyarakat;
- h. pelaksanaan pengembangan kegiatan kelompok ekonomi produktif pra koperasi;
- i. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh atasan sesuai dengan tbidang tugas dan fungsinya.

## 2.2 Seksi Kelembagaan Masyarakat

Seksi Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan bahan perencanaan bidang Kelembagaan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan pengembangan kegiatan pengelolaan dan penyusunan data kelurahan dibidang pembangunan, potensi, lembaga masyarakat, imstitusi dan peran serta masyarakat;
- e. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat

Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- c. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan data Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. pengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program kerja dan kegiatan urusan kerjasama/bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat Propinsi dan Pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### 3.1 Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat

Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan berbasis Masyarakat.

Kepala Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembangunan berbasis masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- b. penyusunan bahan kebijakan bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- c. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Pembangunan Berbasis
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan data pembangunan berbasis masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- e. penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat;
- f. pelaksanaan verifikasi, analisis dan pengolahan data Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3.2 Seksi Ketahanan Masyarakat

Seksi Ketahanan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Ketahanan Masyarakat;
- b. penyusunan bahan kebijakan bidang Ketahanan Masyarakat;
- c. penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pelaksanaan verifikasi, analisis dan pengolahan data ketahanan masyarakat;
- e. penyusunan bahan kebijakan bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat kota, Propinsi dan Pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan data perempuan dan anak dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan data, verifikasi, analisis dan pengolahan data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya database perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- g. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

#### 4.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang pengembangan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan teknis pengumpulan data perempuan dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur – unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- d. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan pelembagaan Pengarus Utamaan Gender;
- e. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan yang responsif gender;
- f. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kerja sama pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- h. pelaksanaan pengembangan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- i. pelaksanaan pengembangan kegiatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP – PAR) dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja;
- j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4.2 Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seksi Perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

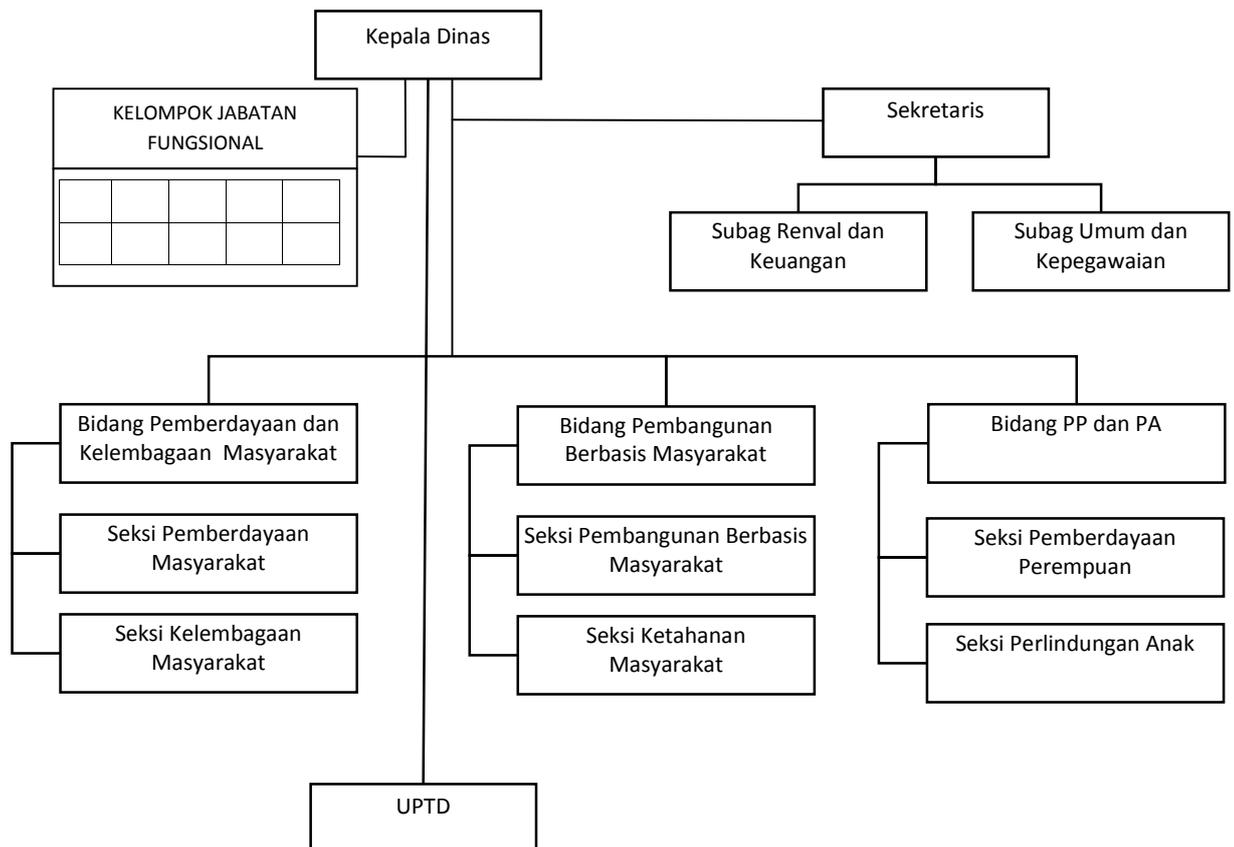
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang pengembangan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan bahan kebijakan bidang perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan perencanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Kota;
- e. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan teknis pengumpulan data perlindungan anak dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- f. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan Kota Layak Anak;
- g. pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama perlindungan anak;
- h. pengembangan perlindungan hak anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- i. pelaksanaan pengembangan kegiatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap anak dan remaja dengan mengoptimalkan peran Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP -PAR) dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja;
- j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**2.1.2 Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, nampak pada bagan berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 19 (Sembilan belas) orang.

Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	3	4	7
4	D3	1	1	2
5	S1	2	6	8
6	S2	2	-	2
	Jumlah	8	11	19

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Jenjang Kepangkatan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	3	6	9
3	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	8	11	19

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Kota Pekalongan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	baik		2 gedung
2	Kendaraan roda empat	baik		3 unit
3	Kendaraan roda dua	baik		17 unit
4	Alat kantor dan rumah tangga	baik		412 unit
5	Alat studio dan alat komunikasi	baik		19 unit

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekalongan telah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
2	Jumlah karang taruna terbina						31 KT	31 KT	31 KT			31 KT	31 KT	31 KT			100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%).						3,55%	3,55%	3,55%			3,55%	16,54%	15,60%			100%	465,92%	439,44%
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						94,68	94,69	94,71			N/A	94,43	94,59			#VALUE!	99,73	99,87
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						64,08	64,18	64,28			N/A	65,11	68,62			#VALUE!	101,45	106,75
8	Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan						1 keg	1 keg	2 keg			1 keg	1 keg	2 keg			100%	100%	100%
9	Persentase jumlah kader posyandu terampil						3,33%	18,67%	20,00%			3,33%	19,66%	20,00%			100%	105,30%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
10	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga						0,087%	0,081%	0,075%			0,082%	0,026%	0,027%			106,10%	311,54%	277,78%
11	Persentase kasus KDRT yang tertangani						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
12	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
13	Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan						19%	37%	56%			19%	37,04%	118,52%			100%	100,11%	211,64%
14	Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak						24	25	26			24	24	27			100%	96%	163,85%
15	Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak						17	20	24			17	20	29			100%	100%	100%
16	Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan						0,07%	0,80%	1,50%			0,07%	1,11%	1,59%			100%	138,75%	124,00%
17	Persentase pengetahuan anak tentang hak anak						1%	1%	2%			1%	1%	1,59%			100%	100%	106%

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BTL</b>			-	2.255.000.000	2.484.648.000			-	2.142.617.587	2.261.745.076			-	95,02	91,03	2.484.648.000	2.261.745.076
Bj Pegawai			-	2.255.000.000	2.484.648.000			-	2.142.617.587	2.261.745.076			-	95,02	91,03	2.484.648.000	2.261.745.076
<b>BL</b>			3.373.820.000	4.055.980.000	5.316.484.000			3.102.446.641	3.567.609.178	4.935.472.810			91,96	87,96	92,83	5.316.484.000	4.935.472.810
<i>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</i>			728.000.000	613.300.000	583.700.000			717.582.492	574.669.338	551.933.958			98,57	93,70	94,56	583.700.000	551.933.958
Penyediaan jasa surat menyurat			1.200.000	2.400.000	2.400.000			1.199.940	890.000	1.901.000			100,00	37,08	79,21	2.400.000	1.901.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			81.000.000	71.000.000	85.800.000			76.562.564	48.741.627	63.571.703			94,52	68,65	74,09	85.800.000	63.571.703
Penyediaan jasa administrasi dan keuangan			26.400.000	29.400.000	35.700.000			26.400.000	29.400.000	35.700.000			100,00	100,00	100,00	35.700.000	35.700.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor			29.600.000	38.000.000	60.500.000			29.491.400	36.519.000	58.561.600			99,63	96,10	96,80	60.500.000	58.561.600
Penyediaan alat tulis kantor			61.000.000	25.000.000	25.000.000			60.845.250	24.918.950	24.641.000			99,75	99,68	98,56	25.000.000	24.641.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12.700.000	10.000.000	10.000.000			11.819.400	8.908.100	9.842.800			93,07	89,08	98,43	10.000.000	9.842.800
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			2.400.000	2.500.000	2.500.000			2.400.000	2.219.000	1.695.000			100,00	88,76	67,80	2.500.000	1.695.000
Penyediaan peralatan rumah tangga			5.900.000	2.500.000	2.500.000			5.073.500	1.920.000	1.819.000			85,99	76,80	72,76	2.500.000	1.819.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2.300.000	2.500.000	2.500.000			2.100.000	2.125.000	2.220.500			91,30	85,00	88,82	2.500.000	2.220.500
Penyediaan makanan dan minuman			40.000.000	30.000.000	31.800.000			36.192.000	19.032.000	26.987.000			90,48	63,44	84,86	31.800.000	26.987.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			465.500.000	400.000.000	325.000.000			465.498.438	399.995.661	324.994.355			100,00	100,00	100,00	325.000.000	324.994.355
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>317.300.000</b>	<b>143.900.000</b>	<b>203.590.000</b>			<b>223.718.305</b>	<b>110.199.519</b>	<b>166.634.200</b>			70,51	76,58	81,85	203.590.000	166.634.200
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			30.000.000	36.600.000	71.690.000			29.661.000	30.190.000	71.210.000			98,87	82,49	99,33	71.690.000	71.210.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			70.300.000	55.000.000	61.000.000			59.441.805	40.916.519	36.817.800			84,55	74,39	60,36	61.000.000	36.817.800
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair			2.500.000	-	1.200.000			2.500.000	-	1.100.500			100,00			1.200.000	1.100.500
Pemeliharaan rutin/berkala komputer				8.500.000	6.400.000				1.579.000	2.271.000				18,58	35,48	6.400.000	2.271.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor			204.000.000	37.400.000	60.000.000			123.145.000	34.017.000	53.679.900			60,37	90,95	89,47	60.000.000	53.679.900
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			10.500.000	6.400.000	3.300.000			8.970.500	3.497.000	1.555.000			85,43	54,64	47,12	3.300.000	1.555.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>35.000.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>33.000.000</b>			<b>33.800.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>30.276.000</b>			96,57	92,98	91,75	33.000.000	30.276.000
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)			10.000.000	8.000.000	8.000.000			10.000.000	7.100.000	6.645.000			100,00	88,75	83,06	8.000.000	6.645.000
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD			10.000.000	8.000.000	8.000.000			10.000.000	7.400.000	7.864.000			100,00	92,50	98,30	8.000.000	7.864.000
Penyusunan Profil Perangkat Daerah					12.000.000					10.767.000							
Monitoring dan Evaluasi SKPD			5.000.000	5.000.000	5.000.000			4.950.000	5.000.000	5.000.000			99,00	100,00	100,00	5.000.000	5.000.000
Penyusunan Renstra SKPD			10.000.000	-	-			8.850.000	-				88,50			-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Revisi Renstra				7.500.000	-				7.000.000					93,33	#DIV/0!	-	-
<b>Program Peningkatan Pelayanan masyarakat (PPPM)</b>			<b>56.520.000</b>	<b>61.600.000</b>	<b>72.014.000</b>			<b>56.409.344</b>	<b>59.932.920</b>	<b>71.908.000</b>			99,80	97,29	99,85	72.014.000	71.908.000
Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD			43.520.000	48.600.000	52.014.000			43.409.344	46.932.920	52.008.000			99,75	96,57	99,99	52.014.000	52.008.000
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif			13.000.000	13.000.000	20.000.000			13.000.000	13.000.000	19.900.000			100,00	100,00	99,50	20.000.000	19.900.000
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>			<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100.000.000</b>			<b>19.700.000</b>	<b>31.250.000</b>	<b>100.000.000</b>			60,62	96,15	100,00	100.000.000	100.000.000
Penguatan kelembagaan forum anak			32.500.000	32.500.000	100.000.000			19.700.000	31.250.000	100.000.000			60,62	96,15	100,00	100.000.000	100.000.000
<b>Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>			<b>250.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>230.000.000</b>			<b>240.540.000</b>	<b>264.217.000</b>	<b>229.892.000</b>			96,22	97,86	99,95	230.000.000	229.892.000
Fasilitasi menuju kota layak anak			250.000.000	270.000.000	230.000.000			240.540.000	264.217.000	229.892.000			96,22	97,86	99,95	230.000.000	229.892.000
<b>Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>			<b>49.000.000</b>	<b>80.200.000</b>	<b>100.000.000</b>			<b>49.000.000</b>	<b>75.150.000</b>	<b>95.455.000</b>			100,00	93,70	95,46	100.000.000	95.455.000
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan			49.000.000	80.200.000	100.000.000			49.000.000	75.150.000	95.455.000			100,00	93,70	95,46	100.000.000	95.455.000
<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>			<b>595.000.000</b>	<b>1.081.000.000</b>	<b>1.002.350.000</b>			<b>582.345.000</b>	<b>984.849.301</b>	<b>960.928.152</b>			97,87	91,11	95,87	1.002.350.000	960.928.152
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender			48.000.000	48.000.000	68.800.000			47.250.000	48.000.000	68.660.000			98,44	100,00	99,80	68.800.000	68.660.000
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK			500.000.000	850.000.000	750.550.000			488.620.000	763.449.301	711.438.152			97,72	89,82	94,79	750.550.000	711.438.152

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga			47.000.000	63.000.000	63.000.000			46.475.000	54.600.000	61.980.000			98,88	86,67	98,38	63.000.000	61.980.000
Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok wanita dan PKK (DBHCHT)			-	120.000.000	120.000.000				118.800.000	118.850.000			-	99,00	99,04	120.000.000	118.850.000
<b>Program model operasional BKB-posyandu padu</b>			<b>40.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>			<b>39.000.000</b>	<b>49.750.000</b>	<b>48.550.000</b>			97,50	99,50	97,10	50.000.000	48.550.000
Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat			40.000.000	50.000.000	50.000.000			39.000.000	49.750.000	48.550.000			97,50	99,50	97,10	50.000.000	48.550.000
<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>			<b>319.000.000</b>	<b>388.880.000</b>	<b>516.050.000</b>			<b>297.118.000</b>	<b>334.781.700</b>	<b>447.968.200</b>			93,14	86,09	86,81	516.050.000	447.968.200
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan			244.000.000	288.880.000	416.050.000			223.178.000	261.517.500	370.860.200			91,47	90,53	89,14	416.050.000	370.860.200
Fasilitasi teknologi tepat guna			75.000.000	100.000.000	100.000.000			73.940.000	73.264.200	77.108.000			98,59	73,26	77,11	100.000.000	77.108.000
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>			<b>851.500.000</b>	<b>1.116.100.000</b>	<b>2.385.780.000</b>			<b>746.853.500</b>	<b>871.585.400</b>	<b>2.199.017.300</b>			87,71	78,09	92,17	2.385.780.000	2.199.017.300
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			26.500.000	26.500.000	26.500.000			25.320.000	14.525.000	11.175.000			95,55	54,81	42,17	26.500.000	11.175.000
Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat			50.000.000	160.000.000	160.000.000			50.000.000	158.500.000	155.430.000			100,00	99,06	97,14	160.000.000	155.430.000
Fasilitasi penyelenggaraan lomba pemberdayaan masyarakat			93.500.000	44.600.000	44.600.000			92.252.000	44.350.000	40.773.000			98,67	99,44	91,42	44.600.000	40.773.000
Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman			410.500.000	484.000.000	211.180.000			315.309.000	435.959.400	145.787.000			76,81	90,07	69,03	211.180.000	145.787.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan			130.000.000	130.000.000	667.000.000			124.850.000	103.278.000	655.368.700			96,04	79,44	98,26	667.000.000	655.368.700
Fasilitasi neighbourhood development			106.000.000	106.000.000	106.000.000			105.800.000	77.406.000	84.379.600			99,81	73,02	79,60	106.000.000	84.379.600
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan			35.000.000	165.000.000	170.500.000			33.322.500	37.567.000	119.168.000			95,21	22,77	69,89	170.500.000	119.168.000
Fasilitasi kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)				-	1.000.000.000					986.936.000							
<b>Program pemberdayaan masyarakat</b>			<b>100.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>40.000.000</b>			<b>96.380.000</b>	<b>184.724.000</b>	<b>32.910.000</b>			96,38	97,22	82,28	40.000.000	32.910.000
Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok pemuda dan karang taruna (DBHCHT)			-	40.000.000	40.000.000			-	39.020.000	32.910.000			-	97,55	82,28	40.000.000	32.910.000
Fasilitas kegiatan kepemudaan dan karang taruna			100.000.000	150.000.000	-			96.380.000	145.704.000	-			96,38	97,14			
<b>TOTAL BTL+BL</b>			<b>3.373.820.000</b>	<b>6.310.980.000</b>	<b>7.801.132.000</b>			<b>3.102.446.641</b>	<b>5.710.226.765</b>	<b>7.197.217.886</b>			<b>91,96</b>	<b>90,48</b>	<b>92,26</b>	<b>7.801.132.000</b>	<b>7.197.217.886</b>

Dari tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan realisasinya baik sehingga dapat dikatakan bahwakinerja pelayanan perangkat daerah telah tercapai sesuai dengan sasarannya.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Perbandingan capaian IPG Kota Pekalongan Tahun 2010 sd 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah, sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Perbandingan Capaian IPG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah**

No	Kab/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Pekalongan	93,11	93,55	94,31	94,62	94,65	94,71
2	Kota Tegal	89,1	90,24	90,89	91,26	92,1	92,81
3	Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IPG Kota Pekalongan per tahun menunjukkan trend naik dan jika dibandingkan Kota maupun Jawa Tengah , Kota Pekalongan lebih tinggi yang berarti bahwa kontribusi Kota Pekalongan terhadap pembangunan gender cukup signifikan.

**Tabel 2.7 Perbandingan Capaian IDG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah**

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Pekalongan	68,44	66,22	68,67	63,88	67,44
Kota Tegal	69,18	68,00	65,15	76,73	76,67
Provinsi Jawa Tengah	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IDG Kota Pekalongan tahun 2011 sd 2015 naik turun/fluktuatif, jika disandingkan Kota Tegal dan Provinsi Kota Pekalongan masih tertinggal dengan demikian perlu

adanya program/kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan perempuan dalam kehidupan ekonomi maupun politik.

## 2. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	2.128	2.115	2.046	2.007	2.007
Jumlah pekerja perempuan (org)	6.789	6.776	55.548	56.536	56.536
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	31,34	31,21	3,68	3,55	3,55

## 3. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2010-2015 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka rasio 0,035%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093%.

## 4. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 hanya 23% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah mengalami peningkatan yang

signifikan, dimana pada tahun 2014 seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).

## **5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan**

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari 2010-2014 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota  
Pekalongan Tahun 2010-2017**

No	Tahun	Jumlah LPM
1	2013	47
2	2014	27
3	2015	27
4	2016	27
5	2017	27

### 9. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.8. Jumlah pada akhir 2015 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

**Tabel 2.10 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015**

No	Tahun	Jumlah PKK Aktif
1	2013	52
2	2014	32
3	2015	32
4	2016	32
5	2017	32

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat.

Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner.

- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasilnya Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan di Kota Pekalongan.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- f. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- i. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- j. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- k. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat

partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### 2.4.2 **Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.
- b. Perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**

<b>Masalah Utama</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak	Tingginya budaya patriarki di masyarakat	Kurangnya kemandirian perempuan
	Potensi naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya kerjasama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kemandirian kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Kurangnya ketersediaan data yang valid dan update untuk dasar penyusunan perencanaan program kegiatan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas pokok dan fungsi.

- b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak.
  - c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan
  - d. Pelayanan informasi publik belum optimal
2. Permasalahan terkait pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat :
- a. Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) belum optimal.
  - b. Semangat kegotong royongan masyarakat menurun.
  - c. Dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang.
  - d. Pelaporan kegiatan TP. PKK belum tepat waktu
  - e. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang.
  - f. Dukungan anggaran untuk sinkronisasi penyusunan data profil kelurahan belum memadai.
  - g. Potensi nilai adat istiadat masyarakat belum diberdayakan secara optimal.
3. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
- a. Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender masih rendah
  - b. Kekerasan berbasis gender dan anak cenderung meningkat.
  - c. Kota Pekalongan menjadi Kota Layak Anak belum terwujud
  - d. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal.
  - e. Dukungan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memadai.
4. Permasalahan terkait pembangunan berbasis masyarakat:
- a. Pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan belum optimal
  - b. Pendamping teknis dari OPD terkait terhadap kegiatan pembangunan belum sesuai dengan yang diharapkan.
  - c. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kurang efektif.
  - d. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih kurang.

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

**Kota Pekalongan** merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa.. Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan.

Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

**Sejahtera** Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan **sejahtera**, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan **Kota Sejahtera** adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Dengan melihat definisi Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

**Mandiri** mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan.

**Berbudaya** memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Indikator Kota Pekalongan berbudaya adalah pengakuan dunia terhadap seni dan budaya Kota Pekalongan.

Saat ini terdapat dua pengakuan dunia terhadap budaya Kota Pekalongan, yaitu : Pengakuan UNESCO atas Pelestarian Budaya Batik melalui kerja sama antara Museum Batik dengan Dunia Pendidikan serta Pengakuan UNESCO terhadap Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia

untuk bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Target selama lima tahun adalah mempertahankan kedua pengakuan tersebut melalui berbagai upaya pengembangan dan promosi melalui berbagai upaya pemenuhan infrastruktur, peran media promosi, peran pelestarian dan penyebar-luasan budaya.

**Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas** Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya.

**MISI** untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

**1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan**

Peningkatan akses pendidikan dilakukan dengan melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yakni sampai minimal SMP/MTs atau setara paket B. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005. Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam mendidik anak usia sekolah maupun memanfaatkan beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah terutama anak usia sekolah di wilayah pinggiran perkotaan.

**2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat**

Misi ini ditempuh dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi yang sedang berkembang sehingga mampu menciptakan daya saing regional yang berbasiskan profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipatif serta menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, mudah, murah, tepat waktu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kepastian pelayanan publik. Pelayanan publik yang

harus terus ditingkatkan terutama menyangkut kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kependudukan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Peningkatan ekonomi juga harus bisa dinikmati secara bersama-sama seluruh masyarakat secara inklusif.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan non fisik, melalui pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan sehingga menciptakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang lebih dinamis dan humanis.

5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan tersedianya teknologi informasi yang memadai maka memungkinkan dapat menumbuhkan inovasi daerah, bagi peningkatan ekonomi daerah maupun pelayanan publik.

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Misi ini dilakukan untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan dalam arti luas yang bertujuan membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat lokal sehingga terciptanya suasana tertib, aman, dan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keenam misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian

jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Kondisi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera akan dilihat dari :

- a. indikator angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan;
- b. indikator Indeks Gini yang akan menggambarkan semakin meratanya pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat
- c. indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin menurun sehingga akan ikut mendorong kenaikan income per kapita;
- d. Indeks Pembangunan Manusia dengan komposit Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan PDRB per kapita. Kondisi ini akan diwujudkan melalui :

Misi 1, yaitu "Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan"

Misi 2, yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat". Pada saat sekarang ini, angka kemiskinan Kota Pekalongan menunjukkan penurunan secara konsisten. Selama lima tahun ke belakang, IPM menunjukkan kenaikan secara konsisten. Diharapkan pada tahun 2021 IPM Kota Pekalongan akan mencapai 76,89 dengan capaian masing-masing komposit berupa : Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,08 tahun;

Misi 3, yaitu "Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan",

Misi 4, yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan"

Misi 5, yaitu "Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas"

**FALSAFAH "BRAYAN URIP"** Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Di dalam falsafat "**Brayan Urip**" terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :

**Nilai**

1. Kebersamaan Dalam mewujudkan visi dan misi, Pemerintah ataupun masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami atas kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk selanjutnya bersinergi mewujudkan visi dan misi tersebut. Pemahaman “**Brayan Urip**” menuntun semua pihak, semua pemegang kepentingan, untuk saling memberikan kesempatan dalam mewujudkan visi dan juga saling berbagi atas semua suka dan duka yang diperoleh, baik pada saat terwujudnya visi ataupun pada saat mewujudkannya.
2. Keadilan Nilai keadilan dalam falsafah “**Brayan Urip**” tidak diartikan sebagai sama rata dan sama rasa. Tetapi, lebih mendorong kesadaran kepada individu untuk memberikan penghargaan kepada orang lain sesuai dengan perannya dalam sebuah usaha bersama.
3. Proporsional Falsafah “**Brayan Urip**” tidak hanya merujuk pada kebersamaan dalam menikmati sebuah usaha, tetapi juga kebersamaan berbagi peran dalam meraih keberhasilan visi. Falsafah “**Brayan Urip**” memandang setiap pemegang kepentingan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi terkait dalam satu kesatuan sistem.

#### **Asas**

Untuk dapat mengimplementasikan falsafah “**Brayan Urip**”, maka terdapat tiga asas yang menjadi pegangan, yaitu partisipatif, kolaboratif, dan integratif.

1. Partisipatif Falsafah “**Brayan Urip**” tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Dalam perspektif ini, pembangunan dilaksanakan dengan didasari oleh adanya kesadaran bersama untuk ikut serta, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, ataupun harta kekayaan yang dimiliki.
2. Kolaboratif Bentuk implementasi atas asas partisipatif kemudian lebih terarah sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan kolaboratif ini, partisipan telah mengidentifikasi adanya kesamaan karakter dalam melaksanakan ritme dan dinamika pembangunan. Sehingga sinergitas menjadi lebih mudah terbangun dan diharapkan akan lebih efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Integratif Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan menyatukan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam falsafah “**Brayan**

**Urip**”, partisipasi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri meskipun dalam rentang waktu yang bersamaan.

### **Semangat**

Selain nilai, asas yang dijadikan pegangan, falsafah “**Brayan Urip**” juga diimplementasikan dengan disertai semangat transparansi, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong.

1. Transparan Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah akan dapat diwujudkan apabila tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, keterbukaan atas penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan menjadi penting untuk dilaksanakan.
2. Akuntabel Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari teknis penghitungan secara ilmiah atas pengerahan berbagai sumber daya. Baik semangat **transparansi** ataupun **akuntabel** pada dasarnya merupakan semangat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga diharapkan, falsafah “**Brayan Urip**” akan dapat dilaksanakan, baik dalam tataran perencanaan ataupun dalam tataran pelaksanaan.
3. Kesetaraan Falsafah “**Brayan Urip**” didorong juga oleh semangat kesetaraan. Artinya tidak ada perbedaan status sosial, tidak membedakan antara kaya dan miskin, tidak menempatkan Pemerintah dan Masyarakat dalam derajat sosial yang berbeda, tidak membedakan kepangkatan dan golongan, tidak membedakan antara karyawan dengan pengusaha, tidak membedakan juga antara juragan dengan kulinya.
4. Gotong royong Semangat gotong royong adalah semangat yang telah melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gotong royong mempunyai makna “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan dalam memikul beban.
5. Tanggung jawab. Dalam konteks sistem pemerintahan daerah maka semangat Gotong Royong dalam falsafah “**Brayan Urip**” ini menempatkan.
6. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam posisi yang sama dalam hal memikul beban tanggung jawab dalam mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2021.

**Indikator Pelaksanaan Brayan Urip** Penanaman falsafah “**Brayan Urip**”

memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan “**Brayan Urip**” yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan mendukung pencapaian misi :

**ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.**

Dengan tujuan dan sasaran yang terkait pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah :

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesetaraan gender
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

- a. Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan</li> <li>2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat</li> <li>3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan</li> <li>5) Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas</li> <li>6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum semua TP. PKK tepat waktu dalam pelaporan.</li> <li>• Masih kurangnya sosialisasi dan fasilitasi inovasi TTG kepada masyarakat.</li> <li>• Lunturnya rasa gotong royong pada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>• Terbatasnya SDM yg menangani pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah utk meningkatkan pelayanan publik sebesar-besarnya bagi kesejahteraan msyarakat</li> </ul>
2	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesetaraan gender</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>			
3	<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak</li> <li>- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya akuntabilitas kinerja</li> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> </ul>			

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian PP dan PA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender (IPG)
  - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan  
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO  
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO  
- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun
  - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus  
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak
  - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak  
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :  
- Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar  
- Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian PP dan PA dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender			
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;

4. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa/kelurahan

Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya kelurahan yang memiliki pelayanan administrasi yang baik

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa/kelurahan

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengelolaan keuangan desa/kelurahan

3. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan, tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 **Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat

### 3.3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota  
Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah  
Provinsi (PP PA) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong  
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li> <li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
4	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Tengah dengan Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jawa Tengah Yang Berdaya dan Mandiri.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Pemberdayaan Masyarakat Desa) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM Bapermades dalam menjalankan Tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kapasitas dan kemampuan SDM dalam menjalankan tupoksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil di Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM</li> </ul>
2	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparat pemerintahan desa dan kelurahan dalam pengelolaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya kemampuan aparat kelurahan dalam pengelolaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan aparat kelurahan masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kemampuan aparat kelurahan dalam pembangunan</li> </ul>
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam pengelolaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
4	Meningkatkan pemanfaatan TTG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pengetahuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	oleh masyarakat	pemanfaatan TTG	masyarakat tentang TTG	Kepala Daerah untuk meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui sosialisasi dan gelar TTG.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan selama lima tahun yang lalu dan akan datang tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

#### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	<b>Total</b>	<b>100</b>

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

**Tabel 3.8 Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rang- king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30		
1	Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	1
2	Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	3	60	3	60	2	30	3	45	1	30	225	2
3	Belum optimalnya kinerja organisasi	3	60	3	60	2	30	2	30	1	30	210	3

Berdasarkan hasil rapat/diskusi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, maka ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak.
2. Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya kinerja organisasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Pekalongan ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 maka ditetapkan tujuan pembangunan DPMPPA Kota Pekalongan, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan DPMPPA Kota Pekalongan tersebut disusun sasaran strategis DPMPPA Kota Pekalongan. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPPA Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DPMPPA)	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan.									
			1 <i>Meningkatnya IPG dan IDG</i>	<i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	N/A	94,43	94,59			
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	65,11	68,62			
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,55	16,54	15,60			
2	Mewujudkan keadilan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak.		1 <i>Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan</i>	<i>Persentase kekerasan dalam rumah tangga</i>	0,082	0,026	0,027			
				Persentase kasus KDRT yang tertangani	100,00	100,00	100,00			

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DPMPPA)	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	100,00	100,00	100,00			
			2 Meningkatkan kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak	Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	0,07	1,11	1,86			
				Persentase pengetahuan anak tentang hak anak	1,00	1,00	1,59			
				Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	1,00	1,00	2,00			
				Persentase capaian target peran kelembagaan anak dalam pembangunan	19,00	37,04	118,52			
				Jumlah rintisan Kampung Layak Anak	24,00	24,00	27,00			
				Jumlah rintisan Sekolah Layak Anak	17,00	20,00	29,00			
				Persentase jumlah kader posyandu terampil	3,33	19,66	20,00			

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DPMPPA)	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan									
			1 Meningkatkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, RT RW, PKK, BKM, Karang Taruna)	Persentase kinerja kelembagan masyarakat	100,00	100,00	100,00			
				Jumlah karang taruna terbina	31,00	31,00	31,00			
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan									
			1 Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00	100,00	100,00			

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DPMPPA)	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat									
			1 Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00	100,00	100,00			
6	Meningkatkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						94,72	94,74	94,75
			1 Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				64,38	64,48	64,58
				Predikat Kota Layak Anak				Pratama	Pratama	Pratama
			2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat				10,00	10,00	10,00
7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan						70,00	75,00	77,00

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DPMPPA)	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Masyarakat								
			1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP				77,50	80,00	82,50
			2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik				800,00	850,00	900,00

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas			
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesetaraan gender	1 Meningkatkan keberdayaan gender serta perlindungan anak	1 Meningkatkan pengarusutamaan gender	Meningkatkan kemandirian perempuan
		2 Meningkatkan sinergitas dan jejaring unit-unit layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Meningkatkan komitmen dan kompetensi pemberian layanan korban kekerasan da anak
	2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan ketersediaan data yang valid dan update untuk dasar penyusunan perencanaan program kegiatan	Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan
		2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan informasi publik yang terbuka, mudah, cepat dan akurat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Renstra Tahun 2016-2021 telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan;
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat (PPPM)
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
6. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
7. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
9. Program model operasional BKB- posyandu padu
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
11. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12. Program pemberdayaan masyarakat

Dengan adanya perubahan RPJMD 2016-2021, dilakukan pula penyesuaian terhadap program kegiatan tahun anggaran 2019-2021, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan;
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat (PPPM);
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan anak
7. Program Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
9. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021, sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif disajikan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							3.102.446.641		3.567.609.178		4.935.472.810											
1	Meningkatkan peran perempuan dan anak dalam pembangunan.																				DPM PPA	Kota Pekalongan
	<i>Meningkatnya IPG dan IDG</i>			1 <i>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i>	94,71	N/A		94,43		94,59												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,44	N/A		65,11		68,62												
				3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,55	3,55		16,54		15,60												
			<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	N/A	<b>582.345.000</b>	94,43	<b>984.849.301</b>	94,59	<b>960.928.152</b>											
				2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,44	N/A		65,11		68,62												
				3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,55	3,55		16,54		15,60												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peranglat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	50,00	50,00	47.250.000	50,00	48.000.000		68.660.000											
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan P2MBG						50,00												
				Jumlah Dharma Wanita yang mendapat fasilitasi						1,00												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2 Fasilitas peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	Jumlah TP-PKK yang mendapat fasilitasi	32,00	32,00	488.620.000	32,00	763.449.301	32,00	711.438.152											
				Jumlah peserta yang mengikuti seminar Hari Ibu						300,00												
			3 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP	100,00	100,00	46.475.000	100,00	54.600.000	100,00	61.980.000											
			4 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi Bagi Kelompok Wanita	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K	54,00			54,00	118.800.000	54,00	118.850.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			dan PKK (DBHCHT)																			
2	Mewujudkan keadilan, kesetaraan gender, peningkatan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak.																					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	1 <i>Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan</i>			1 <i>Persentase kekerasan dalam rumah tangga</i>	0,093	0,082		0,026		0,027												
				2 <i>Persentase kasus KDRT yang tertangani</i>	100,00	100,00		100,00		100,00												
				3 <i>Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	100,00	100,00		100,00		100,00												
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1 <i>Persentase kekerasan dalam rumah tangga</i>	0,093	0,082	49.000.000	0,026	75.150.000	0,027	95.455.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				2 Persentase kasus KDRT yang tertangani	100,00	100,00		100,00		100,00												
				3 Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00		100,00		100,00												
			1 Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi		13,00	49.000.000	13,00	75.150.000	14,00	95.455.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2 Meningkatkan kompetensi dan kemampuan organisasi perempuan dan forum anak			1 Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	0,06	0,07		1,11		1,86												
				2 Persentase pengetahuan anak tentang hak anak	1,00	1,00		1,00		1,59												
				3 Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	1,00	1,00		1,00		2,00												
				4 Persentase capaian target peran kelembagaan anak dalam pembangunan	19,00	19,00		37,04		118,52												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				5 Jumlah rintisan Kampung Layak Anak	20,00	24,00		24,00		27,00												
				6 Jumlah rintisan Sekolah Layak Anak	16,00	17,00		20,00		29,00												
				7 Persentase jumlah kader posyandu terampil	3,33	3,33		19,66		20,00												
			<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	1 Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	0,06	0,07	<b>19.700.000</b>	1,11	<b>31.250.000</b>	1,86	<b>100.000.000</b>											
				2 Persentase pengetahuan anak tentang hak anak	1,00	1,00		1,00		1,59												
			1 Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	80,00	80,00	19.700.000	80,00	31.250.000	228,00	100.000.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	1,00	1,00	240.540.000	1,00	264.217.000	2,00	229.892.000											
				2 Pesentase capaian target peran kelembagaan anak dalam pembangunan	19,00	19,00		37,04		118,52												
				3 Jumlah rintisan Kampung Layak Anak	20,00	24,00		24,00		27,00												
				4 Jumlah rintisan Sekolah Layak Anak	16,00	17,00		20,00		29,00												
			1 Fasilitas Menuju Kota Layak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kampung Ramah Anak	80,00	100	240.540.000		264.217.000		229.892.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menuju kota layak anak				330,00														
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan menuju kota layak anak dan pembinaan generasi muda						300,00												
			<b>Program model operasional BKB Posyandu PADU</b>	1 Persentase jumlah kader posyandu terampil	3,33	3,33	<b>39.000.000</b>	19,66	<b>49.750.000</b>	20,00	<b>48.550.000</b>											
			1 Kegiatan pengembangan model institusi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu	80,00	80,00	39.000.000	80,00	49.750.000	80,00	48.550.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			masyarakat																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100,00	10,00	717.582.492	10,00	574.669.338	10,00	551.933.958											
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12,00	12,00	1.199.940	12,00	890.000	12,00	1.901.000											
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi kantor dan jasa	12,00	12,00	76.562.564	12,00	48.741.627	12,00	63.571.703											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			listrik	penerangan di 4 balai																	
			3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12,00	12,00	26.400.000	12,00	29.400.000	12,00	35.700.000										
			4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan	12,00	12,00	29.491.400	12,00	36.519.000	12,00	58.561.600										
			5 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor	12,00	12,00	60.845.250	12,00	24.918.950	12,00	24.641.000										
			6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12,00	12,00	11.819.400	12,00	8.908.100	12,00	9.842.800										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			ndaan																			
			7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12,00	12,00	2.400.000	12,00	2.219.000	12,00	1.695.000											
			8 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12,00	12,00	5.073.500	12,00	1.920.000	12,00	1.819.000											
			9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan	12,00	12,00	2.100.000	12,00	2.125.000	12,00	2.220.500											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			n perundang-undangan	perundang-undangan																		
			10 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12,00	12,00	36.192.000	12,00	19.032.000	12,00	26.987.000											
			11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah	12,00	12,00	465.498.438	12,00	399.995.661	12,00	324.994.355											
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/ktr, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan ktr dan	100,00	100,00	223.718.305	100,00	110.199.519	100,00	166.634.200											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				rumah tangga																	
			1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12,00	12,00	29.661.000	12,00	30.190.000	12,00	71.210.000										
			2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12,00	12,00	59.441.805	12,00	40.916.519	12,00	36.817.800										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peranglat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer				12,00	1.579.000	12,00	2.271.000											
			4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12,00	12,00	2.500.000			8,00	1.100.500											
			5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	47,00	47,00	123.145.000	7,00	34.017.000	11,00	53.679.900											
			6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan	12,00	12,00	8.970.500	12,00	3.497.000	12,00	1.555.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			gedung kantor	n gedung kantor																		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	1 Persentase ketersediaan capaian laporan kinerja	100,00	100,00	<b>33.800.000</b>	100,00	<b>26.500.000</b>	100,00	<b>30.276.000</b>											
			1 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keuangan	Jumlah buku renja yang akan disusun	12,00	12,00	10.000.000		7.100.000		6.645.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			an SKPD)																			
				Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun				6,00		6,00												
			2 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan	Jumlah buku RKA, LAKIP dan laporan-laporan Keuangan SKPD yang akan disusun	48,00	48,00	10.000.000		7.400.000		7.864.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			SKPD																			
				Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) yang disusun				5,00		5,00												
			3 Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun						1,00	10.767.000											
			4 Monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah monitoring dan evaluasi SKPD yang akan dilaksanakan	100,00	100,00	4.950.000		5.000.000		5.000.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12,00		12,00												
			5 Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah buku renstra yang akan disusun	10,00	10,00	8.850.000															
			6 Penyusunan Revisi Renstra	Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun				10,00	7.000.000													
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPM)</b>	1 Persentase pengaduan			<b>56.409.344</b>		<b>59.932.920</b>		<b>71.908.000</b>											
			1 Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD	12,00	12,00	43.409.344	12,00	46.932.920	12,00	52.008.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan	1,00	1,00	13.000.000	1,00	13.000.000		19.900.000										
				Jumlah kegiatan pameran inovasi dan kamaval batik dalam rangka Harteknas						3,00											
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatnya kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, RT RW, PKK, BKM, Karang Taruna)			1 Persentase kinerja lembaga masyarakat	100,00	100,00		100,00		100,00												
				2 Jumlah karang taruna terbina	31,00	31,00		31,00		31,00												
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	100,00	100,00	<b>297.118.000</b>	100,00	<b>334.781.700</b>	100,00	<b>447.968.200</b>											
			1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti orientasi LKK	938,00	938,00	223.178.000		261.517.500		370.860.200											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Masyarakat Perdesaan																			
				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT RW				967,00		800,00												
				Reorganisasi LPMBKM kelurahan, Kecamatan, Kota						27,00												
			2 Kegiatan Fasilitas Teknologi Tepat Guna	Jumlah Terfasilitasinya lomba TTG Tingkat Kota Pekalongan dan Tingkat Nasionalah inovator TTG		1,00	73.940.000		73.264.200		77.108.000											
				Jumlah inovator TTG				3,00		3,00												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peranglat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Program Pemberdayaan Masyarakat	1 Jumlah karang taruna terbina	31,00	31,00	96.380.000	31,00	184.724.000	31,00	32.910.000											
			1 Fasilitas kegiatan kepemudaan dan karang taruna	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas karang taruna		100,00	96.380.000		145.704.000		-											
				Jumlah pelatihan kepemimpinan bagi karang tarunan				2,00														
			2 Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan				47,00	39.020.000	47,00	32.910.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			pemuda dan karang taruna (DBHCHT)																			
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan																					
	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan			1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00	100,00		100,00		100,00												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00	100,00	167.572.000	100,00	217.375.000	100,00	1.194.314.000											
			1 Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota pekalongan yang mendapat pembinaan	32,00	32,00	25.320.000	32,00	14.525.000	32,00	11.175.000											
			2 Kegiatan Fasilitas Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan	3,00	3,00	50.000.000	3,00	158.500.000	94,00	155.430.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Terfasilitasi kegiatan BBGRM	1,00	1,00																
				Jumlah kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan				94,00		94,00												
			3 Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Terpilihnya Kelurahan terbaik		3,00	92.252.000		44.350.000		40.773.000											
				Jumlah Kelurahan yg dievaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdaya	27,00	27,00		27,00														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				an masyarakat																	
				Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan						3,00											
			4 Fasilitas kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD						3,00	986.936.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5	Meningkatkan fasilitas pemberdayaan masyarakat																					
	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat			1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00	100,00		100,00		100,00												
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00	100,00	579.281.500	100,00	654.210.400	100,00	1.004.703.300											
			1 Kegiatan Fasilitas program peningkatan kualitas	Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitas kegiatan Program NUSP,	27,00	27,00	315.309.000		435.959.400		145.787.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			kawasan permukiman	SANIMAS dan PAMSIMAS																		
				Jumlah bulan terfasilitasinya Program NUSP, SANIMAS dan PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku				12,00		12,00												
			2 Kegiatan Fasilitas Program Akselerasi Pembangunan	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan	4,00	4,00	124.850.000	4,00	103.278.000	4,00	655.368.700											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Wilayah Kecamatan dan Kelurahan																			
			3 Kegiatan Fasilitas Neighbourhood Development	Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development	13,00	10,00	105.800.000	13,00	77.406.000	12,00	84.379.600											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			4 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Tertindakannya koordinasi kegiatan peningkatan kualitas rumah dan lingkungan serta pelayanan UPM		1,00	33.322.500		37.567.000		119.168.000											
				Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan	12,00			12,00		12,00												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				kemiskinan dan pengelolaan UPM																	
													3.547.600.000		3.347.300.000		3.915.300.000		3.965.300.000	DPM PPA	
1	Meningkatkan kesetaraan gender			Indeks Pembangunan Gender (IPG)								94,72	2.750.100.000	94,74	2.700.100.000	94,75	3.278.100.000	94,95	3.328.100.000		
	1 Meningkatkan keberdayaan gender serta perlindungan anak			1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)								64,38	1.191.000.000	64,48	1.141.000.000	64,58	1.141.000.000	64,58	1.191.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peranglat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				2 Predikat Kota Layak Anak										Pratama		Pratama		Pratama		Pratama			
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	1 Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang sudah responsif gender								51,61	330.000.000	77,42	330.000.000	100,00	280.000.000	100,00	330.000.000				
				2 Persentase Kampung Layak Anak								25,00		50,00		100,00		100,00					
			1 Kegiatan fasilitasi Menuju Kota Layak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda								349,00	230.000.000		180.000.000		180.000.000		230.000.000				
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan											250,00		250,00		250,00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				menuju Kota Layak Anak																	
				Jumlah dokumen Perwal Perlindungan Anak yang disusun										1,00							
				Jumlah lembaga APSAI yang dibentuk										1,00							
				Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan lomba Sekolah Ramah Anak										4,00		4,00		4,00			
				Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba										4,00		4,00		4,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kelurahan Ramah Anak																	
			2 Kegiatan penguatan Kelembagaan Forum Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak								250,00	100.000.000	250,00	100.000.000	250,00	100.000.000	250,00	100.000.000		
				Jumlah Forum Anak yang terpilih mendapat penghargaan lomba Forum Anak										4,00		4,00					
			3 Kegiatan penyusunan data pilah gender	Jumlah dokumen profil data pilah gender dan anak Kota Pekalongan										1,00	50.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				yang disusun																		
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan anak	1 Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak								100,00	861.000.000	100,00	811.000.000	100,00	861.000.000	100,00	861.000.000			
			1 Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR								12,00	100.000.000	12,00	100.000.000	12,00	150.000.000	12,00	150.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga Mitra P2MBG								50,00	168.000	50,00	181.000	50,00	431.000	50,00	431.000		
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG								45,00		45,00		45,00		45,00			
				Jumlah kelompok posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba posyandu										4,00		4,00		4,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB										4,00		4,00		4,00			
				Jumlah peserta yang mengikuti Seminar Budi Pekerti, KDRT dan Kesehatan										240,00		240,00		240,00			
			3	Kegiatan pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP							100,00	63.000.000								
			4	Kegiatan fasilitasi peningkatan ketrampilan dan	Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi							32,00	500.000.000		500.000.000		250.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			kinerja PKK																			
				Jumlah TP PKK Kelurahan yang dibina								-		8,00		8,00		8,00				
				Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK										3,00		3,00		3,00				
				Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK										3,00		3,00		3,00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba produk unggulan one village one produk innovation										3,00		3,00		3,00			
				Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK										3,00		3,00		3,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan orientasi pengelolaan sampah dan pelatihan pembuatan tas dan limbah plastik										112,00		112,00		112,00			
			5 Kegiatan fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja dharma wanita	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita								12,00	30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
				Jumlah fasilitasi peringatan HUT Dharma Wanita dan Hari Ibu										2,00		2,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah peserta yang terpilih mendapat penghargaan lomba dolanan anak										6,00		6,00		6,00			
				Jumlah peserta yang terpilih mendapat penghargaan lomba tata rias										6,00		6,00		6,00			
	2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat			1 Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat								10,00	1.559.000,00	10,00	1.559.000,00	10,00	2.137.000,00	10,00	2.137.000,00		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	1 Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan								100,00	1.012.000,00	100,00	1.012.000,00	100,00	1.590.000,00	100,00	1.590.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Membangun Desa	pemberdayaan																		
			1 Kegiatan Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM								12,00	192.000.000		80.000.000		95.000.000		578.000.000			
				Jumlah monev PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas										540,00		540,00		540,00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2 Kegiatan Fasilitas Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan								4,00	600.000.000	-	100.000.000	-	120.000.000	-	832.000.000		
				Jumlah monev pembangunan berbasis masyarakat										135,00		135,00		135,00			
				Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator										36,00		36,00		36,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			3 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD								3,00	220.000.000	3,00	832.000.000	3,00	1.375.000.000	3,00	180.000.000		
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1 Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat</b>								<b>33,33</b>	<b>260.600.000</b>	<b>66,67</b>	<b>260.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>260.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>260.600.000</b>		
			1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan								3,00	55.600.000	3,00	55.600.000	3,00	55.600.000	3,00	44.600.000		
				Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan										1,00		1,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				yang disusun																		
			2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK								702,00	205.000.000	702,00	205.000.000	702,00	205.000.000	702,00	216.000.000			
				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat										58,00		58,00		58,00				
				Jumlah monev LKK										54,00		54,00		54,00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan	1 Persentase kinerja kelembagaan masyarakat								100,00	286.500.000	100,00	286.500.000	100,00	286.500.000	100,00	286.500.000		
			1 Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan								32,00	26.500.000								
			2 Kegiatan fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan								94,00	160.000.000		136.500.000		136.500.000		136.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gopng royong masyarakat								3,00		3,00		3,00		3,00			
			3 Kegiatan fasilitasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovator TTG								3,00	100.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000	3,00	150.000.000		
				Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand pameran TTG								-		3,00		3,00		3,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat						80,56			70,00	797.500.000	75,00	647.200.000	77,00	637.200.000	77,00	637.200.000		
	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja			1 Nilai Evaluasi AKIP		70,40		72,33		75,46			80,00	797.500.000	85,00	647.200.000	90,00	637.200.000	90,00	637.200.000		
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja									33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000			
			1 Kegiatan penyusunan Renja dan Evaluasi	Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta									6,00	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Renja Perangkat Daerah	evaluasi renja pertriwulan yang disusun																		
				Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun										6,00		6,00		6,00				
			2 Kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( Perjanjian Kinerja.2 kali, Rencana Aksi, LKJIP ) dan laporan-								6,00	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				laporan keuangan SKPD yang disusun																	
				Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun										6,00		6,00		6,00			
			3	Kegiatan penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun							1,00	12.000.000		12.000.000		11.000.000		11.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peranglat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah dokumen profil bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang disusun										1,00		1,00		1,00			
			4	Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD							12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000		
			5	Kegiatan penyusunan Renstra Perangkat	Jumlah dokumen Renstra yang disusun											1,00	1.000.000	1,00	1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Daerah																			
	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik		420,00		670,00		775,00		800,00		850,00		900,00		900,00				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi								100,00	463.500.000	100,00	491.600.000	100,00	491.600.000	100,00	491.600.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat								12,00	1.500.000	12,00	2.000.000	12,00	2.000.000	12,00	2.000.000		
			2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik								12,00	64.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000	12,00	70.000.000		
			3 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan								12,00	42.500.000	12,00	47.000.000	12,00	47.000.000	12,00	47.000.000		
			4 Kegiatan penyedi	Jumlah bulan penyediaan								12,00	82.000.000	12,00	85.000.000	12,00	85.000.000	12,00	85.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target -Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			aan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor																		
			5 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor								12,00	18.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000			
			6 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan								12,00	6.000.000	12,00	8.000.000	12,00	8.000.000	12,00	8.000.000			
			7 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor								12,00	1.500.000	12,00	1.600.000	12,00	1.600.000	12,00	1.600.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			n bangun an kantor																			
			8 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga								12,00	1.500.000	12,00	1.500.000	12,00	1.500.000	12,00	1.500.000			
			9 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan								12,00	1.500.000	12,00	1.500.000	12,00	1.500.000	12,00	1.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			10 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman								12,00	20.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000		
			11 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah								246,00	225.000.000	246,00	225.000.000	246,00	225.000.000	246,00	225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga								100,00	281.000.000	100,00	102.600.000	100,00	92.600.000	100,00	92.600.000		
			1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala								2,00	120.000.000	2,00	20.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala								20,00	74.000.000	18,00	60.000.000	18,00	60.000.000	18,00	60.000.000		
			3 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara												1,00	1.500.000	1,00	1.500.000		
			4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer								12,00									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peranglat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target -Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			5 Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor								8,00	75.000.000	20,00	14.000.000	4,00	12.500.000	4,00	12.500.000		
			6 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor								12,00	12.000.000	12,00	8.600.000	12,00	8.600.000	12,00	8.600.000		
			7 Kegiatan Pembanagan Gedung Kantor	Jumlah gedung/unit/okasi yang tersusun													30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			8 Kegiatan penyusunan Detail Engineering	Jumlah dokumen DE tersusun											20.000.000							
			<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>										<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>			
			1 Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota								1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000			
			2 Kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik								3,00	10.000.000	3,00	10.000.000	3,00	10.000.000	3,00	10.000.000			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi				Target Pencapaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,71	N/A	94,43	94,59	94,72	94,74	94,75	94,75	
2	Indek Kepuasan Masyarakat				80,56	70,00	75,00	77,00	77,00	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,44	N/A	65,11	68,62	64,38	64,48	64,58	64,58	
4	Predikat Kota Layak Anak					Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	
5	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat					10,00	10,00	10,00	10,00	
6	Nilai Evaluasi AKIP		70,40	72,33	75,46	77,50	80,00	82,50	82,50	
7	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		420,00	670,00	775,00	800,00	850,00	900,00	900,00	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 PEDOMAN TRANSISI**

Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016-2021 disusun guna menyesuaikan terhadap perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan di masa-masa mendatang selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

#### **8.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Ketiga Renstra DPMPPA Kota Pekalongan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPPA Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DPMPPA Kota Pekalongan wajib berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra DPMPPA Kota Pekalongan, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana strategis DPMPPA Kota Pekalongan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan DPMPPA Kota Pekalongan. Visi DPMPPA Kota Pekalongan sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021.

Rencana strategis DPMPPA Kota Pekalongan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur di DPMPPA Kota Pekalongan dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Demiikian semoga Perubahan Ketiga Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pekalongan, 22 November 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pekalongan



**SRI WAHYUNI, SH**  
**NIP 19600116 198603 2 002**